

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

##### 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "pemberdayaan" berasal dari kata dasar "daya" yang mengacu pada tenaga atau kekuatan. Dengan awalan "ber", kata tersebut menjadi "berdaya" yang berarti memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak. Selanjutnya, dengan awalan "pe" dan akhiran "an", kata "berdaya" menjadi "pemberdayaan" yang memiliki arti memberikan kemampuan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha menguatkan kemampuan masyarakat sekaligus memperkuat struktur kelembagaan warga agar mereka mampu mencapai kemandirian dan keluar dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan.

Pemberdayaan berasal dari kata daya atau kekuatan. Konsep modern tentang kekuatan muncul kali pertama dalam tulisan Niccolò Machiavelli dalam *The Prince* pada awal abad 16 dan Thomas Hobbes dalam *Leviathan* pada pertengahan abad 17. Kekuatan tercermin dalam posisi, pengaruh dan pengambilan keputusan. Dengan kekuatan yang dipunyai, individu atau kelompok diharapkan mampu memanfaatkan kekuatan tersebut untuk mendapatkan informasi, teknologi, modal, dan mengembangkan keterampilan dalam mencari solusi bagi masalah kehidupan.<sup>10</sup>

Dalam konteks pemberdayaan, kekuatan merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk mengambil peran aktif dalam mengakses sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kemajuan dan memecahkan masalah kehidupan. Pada dasarnya, pemberdayaan berfokus pada penguatan posisi, pengaruh, dan kemampuan pengambilan keputusan individu atau

---

<sup>10</sup> Siti Aminah dan Narni Farmayanti, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 2

kelompok. Dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki, mereka dapat meningkatkan akses terhadap informasi, teknologi, modal, serta mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari

Semangat demokrasi yang terwujud dalam UU No. 32 Tahun 2004 tercermin dalam pasal 200 hingga 216. Dengan mengembalikan status desa kepada masyarakat adat, tidak ada lagi regulasi yang mengharuskan adanya keseragaman. Hal ini memungkinkan masyarakat desa, sebagai masyarakat adat, untuk memiliki hak dalam membangun diri mereka sendiri dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Perbedaan yang dimiliki satu desa dengan desa lainnya, serta antara wilayah berbeda, merupakan sesuatu yang dapat terjadi secara alami. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses di mana masyarakat, terutama yang memiliki keterbatasan sumber daya, perempuan, dan kelompok-kelompok yang terabaikan lainnya, mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input).

- c. Pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya Pembedayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggung jawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini (Soemodiningrat,2002).<sup>11</sup>

Hadirnya kebijakan Otonomi Desa membawa konsekuensi penting bagi pemerintah desa dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Salah satu tantangan utamanya adalah kemampuan desa untuk membiayai pembangunan secara mandiri. Untuk itu, pemerintah desa perlu mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada di wilayahnya serta melibatkan masyarakat dalam usaha-usaha yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan cara ini, pemerintah desa dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah daerah dan pusat. Melalui pemberdayaan masyarakat, desa dapat menggali kemampuan yang dimilikinya untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan.<sup>12</sup>

Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah krusial yang harus dilakukan oleh pemerintah desa untuk menggali potensi dan kemampuan desa secara maksimal. Melalui pemberdayaan, masyarakat desa dapat diberikan pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam konteks otonomi desa, pemerintah desa dapat memfasilitasi pelatihan, pendampingan, dan pembentukan kelompok-kelompok usaha sehingga masyarakat dapat mengembangkan inisiatif ekonomi lokal yang berkelanjutan. Selain itu,

---

<sup>11</sup> Prasetyo, D. (2019). Peran Bumdes Dalam Membangun Desa. Kalimantan Barat: CV Derwati Press. 67

<sup>12</sup> Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", Jurnal Politik Profetik, Volume 1 Nomor1 Tahun 2013, 11

partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan desa juga dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dengan adanya sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat yang didukung oleh kesadaran kolektif untuk memajukan desa, diharapkan desa dapat mencapai tingkat kemampuan ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dalam pemberdayaan masyarakat, peran dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam pembangunan. Usulan-usulan yang berasal dari masyarakat menjadi landasan bagi program pembangunan di tingkat lokal, regional, bahkan nasional. Melalui proses ini, masyarakat didorong untuk mengidentifikasi kebutuhan, *issues*, dan *development opportunities* serta kehidupan mereka sendiri.<sup>13</sup>

Menurut Ginanjar, pemberdayaan adalah suatu usaha untuk mengembangkan potensi masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki. Hal ini dilakukan dengan upaya yang kuat untuk memperkuat dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat.<sup>14</sup>

Konsep pemberdayaan merujuk pada daya atau kekuatan yang terkandung dalam individu atau kelompok. Dalam perkembangan pemikiran modern, gagasan tentang kekuatan ini pertama kali muncul dalam tulisan Niccolo Machiavelli dalam karyanya *The Prince* pada abad ke-16 awal, dan juga diungkapkan oleh Thomas Hobbes dalam *Leviathan* pada pertengahan abad ke-17. Kekuatan tersebut tercermin dalam posisi yang diemban, kemampuan untuk mengambil keputusan, dan pengaruh yang dimiliki. Dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki, individu atau kelompok diharapkan mampu mendapatkan informasi, teknologi, modal, serta

---

<sup>13</sup> Totok Mardikonto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 61

<sup>14</sup> Ginanjar, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996), 145

mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam mencari solusi atas berbagai tantangan kehidupan yang dihadapi.<sup>15</sup>

Sejalan dengan pemahaman tentang kekuatan dan power, pemberdayaan mengarah pada upaya individu atau kelompok untuk memanfaatkan kekuatan tersebut secara efektif guna mencapai kemajuan dan mengatasi tantangan kehidupan. Pemberdayaan melibatkan proses penguatan posisi, pengambilan keputusan, dan pengaruh agar individu atau kelompok dapat mengakses sumber daya yang diperlukan, seperti pengetahuan, teknologi, modal, dan pengembangan keterampilan. Melalui pemanfaatan power yang dimiliki, mereka mampu menjelajahi berbagai solusi kreatif dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pemberdayaan berperan penting dalam memberikan individu atau kelompok kontrol atas nasib mereka sendiri dan meningkatkan kualitas hidup secara holistik.

## 2. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melihat suatu focus dan tujuan dari adanya pemberdayaan itu sendiri, maka diperlukan indikator-indikator atau alat ukur yang dapat menilai keberhasilan program pemberdayaan. Menurut UNICEF dalam terdapat lima dimensi yang dapat dijadikan dalam mengukur kesuksesan memberdayakan masyarakat, yaitu:

- a. Kesejahteraan Derajat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan tercukupinya kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan, pendidikan serta kesehatan.
- b. Akses Berkaitan dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses sumber daya serta manfaat yang dihasilkannya.
- c. Kesadaran kritis Masyarakat lebih peka terhadap ketimpangan yang terjadi pada dirinya akibat dari

---

<sup>15</sup> Siti Aminah dan Narni Farmayanti, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 2

adanya kesenjangan social dilingkungan dan menghendaki adanya sebuah perubahan menuju yang lebih baik.

- d. Partisipasi Adanya keikutsetaan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan, baik dalam proses pembuatan keputusan, melaksanakan keputusan yang telah dibuat hingga pada proses pengevaluasiannya.
- e. Kontrol Semua lapisan masyarakat memiliki hak dalam dalam mengelola sumber daya yang ada didaerahnya. Dengan kata lain, masyarakat mengontrol dan mengolah sumber daya yang ada didaerahnya.<sup>16</sup>

### 3. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah pada kelompok-kelompok yang rentan dan mengalami keterbatasan dalam mengakses sumber daya produktif, serta individu-individu yang terabaikan dalam proses pembangunan.<sup>17</sup> Masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi rendah, yang menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup meskipun telah berusaha maksimal untuk memperoleh penghasilan, menjadi fokus utama dalam upaya pemberdayaan.

Mereka yang sebenarnya memiliki kesempatan untuk mencari rezeki seringkali menghadapi kendala saat penghasilan yang diperoleh tidak memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarganya. Mereka adalah warga yang tergolong dalam kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan memiliki tingkat aktivitas yang rendah dalam mengoptimalkan potensi diri serta lingkungan sekitarnya untuk melampaui batas kemiskinan yang melingkari mereka. Hal ini disebabkan oleh adanya

---

<sup>16</sup> Indrianti, D. T, dkk (2019). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata Organik di Kabupaten Bondowoso. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 13-18. Diakses melalui website

<sup>17</sup> Kesi Widjiayanti, "Model Pemberdayaan Masyarakat", dalam *Jurnal "Ekonomi Pembangunan"*, No. 01 (2015) 16.

kesenjangan sosial yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan minat dari masyarakat dalam mengembangkan potensi mereka. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُمَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: "Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia".<sup>18</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, terlihat jelas bahwa manusia diberikan amanah untuk menggenggam kendali atas usaha dan usahanya sendiri, walaupun akhir dari segala upaya bergantung pada takdir yang ditetapkan oleh Allah. Dalam pemberian kebebasan ini, manusia diberikan kesempatan untuk membangun masa depan mereka dengan keputusan dan tindakan mereka sendiri. Sebagai individu yang bertanggung jawab, hidup dan nasib seseorang sepenuhnya ditentukan oleh tindakan mereka sendiri, bukan oleh faktor-faktor luar seperti lingkungan, situasi ekonomi, orang lain, keluarga, nasib, atau keadaan lainnya.

#### 4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Kartasmita (1996) dalam Zubaedi (2013) menjelaskan bahwa pemberdayaan memiliki tiga tahapan yang mengarah pada hasil yang diinginkan:

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Karya Agung, 2006), 337.

- a. Menciptakan iklim yang memfasilitasi perkembangan potensi masyarakat (*enabling*). Ini berarti menyadarkan setiap individu dan masyarakat akan potensi yang dimiliki, sehingga dalam proses pemberdayaan, diupayakan untuk memotivasi mereka dalam mengembangkan potensi yang ada.
- b. Memperkuat potensi masyarakat (*empowering*). Hal ini dilakukan melalui tindakan nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, penciptaan lapangan kerja, penyediaan informasi, pasar, infrastruktur, dan peluang lainnya yang dapat memberikan kekuatan kepada masyarakat. Pemberdayaan tidak hanya fokus pada individu, tetapi juga pada sistem dan nilai budaya yang ditanamkan, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan tanggung jawab.
- c. Menjaga masyarakat (*protection*). Dalam pemberdayaan warga desa, penting untuk mengambil langkah-langkah yang mencegah ketidakseimbangan persaingan dan praktik eksploitasi oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah. Hal ini dapat dicapai melalui keberpihakan, pengaturan, atau keputusan bersama yang jelas untuk menjaga pihak yang lemah.<sup>19</sup>

Pada tahap *Enabling*, dilakukan penyediaan kapasitas atau perubahan pengetahuan guna menjadikan masyarakat yang kurang mampu menjadi mampu agar mereka memiliki keterampilan dalam memanfaatkan peluang yang ada. Tahap ini seringkali melibatkan pelatihan, lokakarya, dan kegiatan sejenis. Sedangkan pada tahap *Empowerment*, masyarakat diberi daya, kekuasaan, otoritas, atau kesempatan untuk mandiri tanpa bergantung pada bimbingan, sehingga mereka dapat menjadi masyarakat yang berdaya.

Masyarakat yang telah mencapai kemandirian tidak boleh dibiarkan tanpa perlindungan. Mereka tetap

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman Rahim *et al.*, “Strategi Implementasi Model Pengembangan Wirausahawan Muda Bagi Masyarakat Pesisir Kabupaten Takalar”, Jurnal “Balance” Volume XVI, Nomor 2 (2017): 4.

memerlukan dukungan agar dapat mengambil tindakan konkret dalam pembangunan. Selain itu, kemandirian mereka harus dijaga dan dipelihara agar dapat berkembang dengan baik, dan pada akhirnya membentuk sikap matang dalam masyarakat.

## 5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pemberdayaan adalah pendekatan yang digunakan untuk mengoptimalkan upaya-upaya pemberdayaan, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan mereka guna meningkatkan kualitas hidup. Dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dapat digunakan tingkatan strategi aras yang berbeda,<sup>20</sup> yaitu:

- a. Aras Mikro, pemberdayaan dilakukan melalui pendekatan individual seperti bimbingan, konseling, manajemen stres, dan intervensi krisis untuk membantu klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan mereka. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan berfokus pada tugas (*task-centered approach*).
- b. Aras Mezzo, pemberdayaan dilakukan dalam kelompok klien. Kelompok digunakan untuk media intervensi, dengan pendidikan, pelatihan, dan dinamika kelompok sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap klien dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.
- c. Aras Makro, pendekatan ini juga dikenal sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), di mana perubahan ditujukan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Pendekatan ini menganggap klien sebagai individu yang kompeten dalam memahami situasi

---

<sup>20</sup> Satya Prihantoro, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Meningkatkan Pendapatan (Studi Empiris di Kelurahan Bandung Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo)", Jurnal "NFECE" Volume 2, Nomor 2 (2013): 5.

mereka sendiri, memilih, dan menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep dalam pembangunan yang dimana masyarakat menjadi actor penting dalam prosesnya. Perubahan paradigma dalam pembangunan yang semula pemerintah menjadi actor utama dalam pembangunan bergeser kearah masyarakat yang menjadi actor penting dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat menjadi salah unsur paling penting dalam proses pemberdayaan sebagai upaya dalam menumbuhkan kemandirian masyarakat (Adiyoso, 2009).<sup>21</sup>

Secara universal, keterlibatan masyarakat dapat dimaknai sebagai proses dimana setiap masyarakat memiliki hak dan kewajibannya dalam keikutsertaan proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pengambilan keputusan, tahapan eksekusi program hingga tahapan mengevaluasi program yang sedang dijalankan. Konsep pemberdayaan dalam pembangunan sangat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat, yang dimana bahwa kesuksesan program pemberdayaan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat didalamnya. Dengan kata lain, tingkat partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi suatu program pembangunan dapat berjalan dengan sukses atau tidak.

## 6. Peningkatan Ekonomi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kata "peningkatan" mengacu pada proses, cara, atau tindakan untuk meningkatkan usaha.<sup>22</sup> Peningkatan ekonomi menjadi suatu aspek yang sangat penting untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Hal ini

---

<sup>21</sup> Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2). Diakses melalui <https://journal.ugm.ac.id/index.php/kawistara/article/download/3976/3251> website

<sup>22</sup> Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Cet Ke-3, (Jakarta: Modern English Press, 1991), 1620

perlu dilakukan secara menyeluruh agar dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan.<sup>23</sup>

Dalam analisis kata tersebut, kita dapat memahami bahwa "peningkatan" adalah tindakan atau usaha untuk meningkatkan sesuatu agar menjadi lebih baik. Istilah ini berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan. Sementara itu, "ekonomi" telah dijelaskan sebelumnya sebagai ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui aktivitas produksi, konsumsi, dan distribusi.

Mengacu pada definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penguatan ekonomi melibatkan suatu proses yang bertujuan meningkatkan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dicapai melalui sistem pemberdayaan yang mengoptimalkan sumber daya produksi, baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Menurut Mubyarto, dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, diperlukan empat konsep dasar sebagai landasan utama, yakni:

- a. Penguatan kualitas SDM.
- b. Perluasan sektor modal.
- c. Perluasan peluang kerja dan usaha.
- d. Penguatan kelembagaan bisnis bersama.<sup>24</sup>

Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, terdapat berbagai strategi yang dapat diterapkan, salah satunya adalah melalui kegiatan produksi. Hal ini dikarenakan kegiatan produksi memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat dalam usaha mandiri untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Berikut ini adalah beberapa langkah strategis yang dilakukan:

---

<sup>23</sup> M Paramita, "Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Lokal", dalam *Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, (Bogor: Universitas Djuanda Bogor), Volume 4. No. 1, April 2018, 19

<sup>24</sup> Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), 136

- a. Identifikasi kepada pelaku bisnis untuk mengenali aktor-aktor yang terlibat dalam aktivitas bisnis.
- b. Menerapkan program pembinaan yang berkesinambungan guna memberikan dukungan dan pengembangan kepada pelaku ekonomi.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan agar pelaku ekonomi memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.
- d. Mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>25</sup>

Dalam upaya meningkatkan perekonomian, pendapatan memiliki peran yang penting. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapatan merujuk pada hasil yang diperoleh dari usaha atau aktivitas lainnya.<sup>26</sup> Menurut definisi dari Sadono Sukirno, pendapatan merupakan total penghasilan yang diterima oleh individu atas upaya kerjanya selama periode tertentu, baik itu dalam skala harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan.<sup>27</sup>

Pendapatan dapat diartikan sebagai aliran masuk kas atau peningkatan aset lain dari suatu entitas sebagai hasil dari penyerahan barang, penyediaan jasa, atau kegiatan lain yang menjadi operasi inti dan berkelanjutan dari entitas tersebut. Hal ini juga dapat mencakup pelunasan utang atau kombinasi dari keduanya.<sup>28</sup>

Kontribusi penghasilan dari kegiatan tertentu terhadap total penghasilan rumah tangga dipengaruhi oleh produktivitas produksi yang diterapkan dalam kegiatan

---

<sup>25</sup> Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat: Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2003), 14

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 185.

<sup>27</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 47

<sup>28</sup> Stice James D, dkk. *Akuntansi Intermedite*, (Jakarta: Erlangga, 2009), Edisi 10, 493

tersebut. Terdapat tiga jenis pendapatan dalam keluarga, yaitu::

- a. *Earning Income*  
Pendapatan Aktif atau *earning income* adalah pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan kerja aktif, seperti penghasilan seorang karyawan perusahaan.
- b. Pendapatan Portofolio  
Pendapatan Portofolio diperoleh melalui investasi pada produk keuangan, seperti reksa dana, obligasi, atau saham.
- c. *Pasif Income*  
Pendapatan pasif adalah pendapatan yang dihasilkan melalui sistem yang bekerja untuk menghasilkan uang, misalnya royalti dari penulisan buku atau perekaman.<sup>29</sup>  
Dalam hal bentuknya, terdapat tiga macam pendapatan, yaitu:
  - a. Pendapatan dalam Bentuk Uang  
Pendapatan ini berupa penghasilan dalam bentuk uang yang umumnya diterima sebagai imbalan atas prestasi, seperti gaji atau upah.
  - b. Pendapatan dalam Bentuk Barang  
Pendapatan ini merupakan penghasilan reguler yang tidak selalu berbentuk uang, melainkan diterima dalam bentuk barang.
  - c. Pendapatan selain Uang dan Barang  
Pendapatan ini mencakup penerimaan yang berupa transfer redistribusi dan biasanya mengakibatkan perubahan dalam keuangan rumah tangga.<sup>30</sup>  
Berdasarkan pandangan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pendapatan merupakan jumlah uang atau barang yang diperoleh oleh perusahaan sebagai hasil dari aktivitas yang dilakukan. Pendapatan juga merupakan salah satu tolok ukur penting bagi manajemen

---

<sup>29</sup> Richard G Lipsey, *Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1993), 70

<sup>30</sup> Richard G Lipsey, *Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1993), 74

dalam mengelola sektor industri mikro. Pendapatan dapat berupa bentuk uang maupun barang. Selain itu, pendapatan juga mencakup segala bentuk penerimaan yang terkait dengan transfer redistribusi.

## **B. Manajemen Bisnis Islam**

### **1. Manajemen**

#### **a. Pengertian Manajemen**

Manajemen adalah proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya guna mencapai hasil secara efektif dan efisien. Keberadaan manajemen menjadi penting bagi setiap organisasi agar tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan cara yang efektif dan efisien. Efektivitas mencerminkan kemampuan untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas yang diperlukan guna mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, efisiensi berarti mampu menghasilkan output yang maksimal dengan menggunakan input yang minimal.

Adapun seorang manajer adalah seseorang yang bekerja dengan orang lain untuk mengoordinasikan kegiatan-kegiatan agar tujuan organisasi tercapai. Sebagai manajer, mereka bertanggung jawab dalam mengatur tim yang terdiri dari anggota dari berbagai departemen atau bahkan melibatkan orang dari organisasi lain, misalnya karyawan sementara yang bekerja sebagai pemasok untuk organisasi tersebut..

#### **b. Pengertian Manajemen Syariah**

Manajemen syariah merupakan keahlian dalam mengelola seluruh aset yang dimiliki dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam kitab suci dan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran menjadi pedoman dalam mengelola semua elemen manajemen guna mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu perbedaan utama antara manajemen syariah dan manajemen konvensional adalah peran penting konsep ilahiyah

dalam implementasinya. Konsep ilahiyah ini memainkan peran sentral dalam menjalankan praktik-praktik manajemen dengan penuh kesadaran akan kehadiran Tuhan dan ketaatan terhadap ajaran-Nya.<sup>31</sup>

Konsep ilahiyah dalam manajemen syariah tidak hanya memberikan arahan dalam aspek spiritual dan moral, tetapi juga berperan penting dalam semua aspek kehidupan bisnis dan pengelolaan organisasi. Dalam praktik manajemen syariah, keputusan dan tindakan yang diambil didasarkan pada nilai-nilai keadilan, etika, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Manajemen syariah juga mempromosikan inklusivitas, keadilan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip manajemen yang terpuji dengan panduan syariah, manajemen syariah mampu menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan, transparan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas.

**c. Asas-asas Manajemen Islam**

Dalam Islam Al Quran memberikan dasar asas asas sebagai berikut:

1) Beriman

Asas Iman merupakan salah satu asas bisnis Islam yang mendasarkan segala tindakan bisnis pada prinsip-prinsip iman dan keyakinan. Dalam bisnis Islam, iman menjadi landasan utama yang mengarahkan pengusaha untuk menjalankan usahanya dengan penuh kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Iman juga mendorong pengusaha untuk mengutamakan kebaikan, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, serta menghindari praktik bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

---

<sup>31</sup> Aun Falestien Faletehan, Pengantar Ilmu Manajemen, Buku Perkuliahan Program S-1 Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014, 14

Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 28 yang berarti:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ  
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ  
نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali”.

## 2) Bertakwa

Asas Taqwa mengacu pada ketakwaan dan kesadaran diri terhadap Allah dalam setiap aspek bisnis. Para pengusaha Muslim diharapkan menjalankan usaha mereka dengan kesadaran akan tanggung jawab moral dan etika Islam. Taqwa mendorong pengusaha untuk menghindari penipuan, manipulasi, dan eksploitasi dalam bisnis. Dengan adanya asas Taqwa, pengusaha dituntut untuk bertindak secara jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap interaksi bisnis yang mereka lakukan. Diterangkan dalam surat An-Naba’: 31 yang berarti:

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا

Artinya: “Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (ada) kemenangan (surga).”

## 3) Azas Keseimbangan dan Keadilan

Asas keseimbangan dan keadilan merupakan prinsip yang penting dalam bisnis Islam. Dalam bisnis, penting untuk menjaga

keseimbangan antara kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Pengusaha Muslim diharapkan mempertimbangkan keadilan dalam segala aspek bisnis, seperti dalam penetapan harga yang wajar, pembagian keuntungan yang adil, serta memperhatikan hak-hak karyawan dan konsumen. Asas ini menekankan pentingnya menghindari ketidakseimbangan ekonomi dan memastikan distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat. Diterangkan dalam surat Q.S. An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

#### 4) Musyawarah

Asas Musyawarah menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak terkait dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam bisnis Islam, musyawarah atau konsultasi bersama dianggap sebagai praktek yang dianjurkan untuk mencapai keputusan yang lebih baik dan lebih adil. Pengusaha Muslim diharapkan untuk mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat dari berbagai pihak yang terlibat dalam bisnis, seperti karyawan, mitra usaha, dan konsumen. Dengan melibatkan musyawarah, keputusan bisnis dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepentingan bersama, dan kerjasama antarpihak yang lebih

luas. Diterangkan dalam surat As-Syura: 38 yang berarti:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: "Dan (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka."

## 2. Bisnis Islam

Agama Islam mengharuskan setiap muslim, terutama mereka yang memiliki tanggungan, untuk aktif bekerja dan berusaha. Bekerja tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai salah satu faktor utama yang memungkinkan manusia untuk memperoleh kekayaan materi. Dalam anugerah-Nya, Allah SWT telah melapangkan bumi ini dan memberikan berbagai fasilitas serta sumber daya yang berlimpah agar manusia dapat mencari nafkah yang halal dan mencari rezeki yang berkah. Dalam perspektif Islam, bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab merupakan cara untuk memanfaatkan nikmat-Nya dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ  
وَالِيهِ النُّشُورُ

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Selain untuk memperoleh rezeki, Islam sangat memfokuskan (mewajibkan) aspek kehalalannya, baik dari sisi cara mendapatkannya maupun pengaturan dan pengeluarannya. Dari penjelasan di atas, bisnis dalam Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak terbatas pada kuantitas kepemilikan harta (barang/jasa) beserta keuntungannya, namun dibatasi dalam cara memperoleh dan memanfaatkan hartanya (dengan aturan halal dan haram yang berlaku).<sup>32</sup>

### C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

#### 1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha di desa yang dikelola langsung oleh masyarakat dan pemerintahan desa dengan tujuan memperkuat sektor ekonomi desa, berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, BUMDes didirikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dengan pendekatan ini, ketika BUMDes dapat menghasilkan pendapatan asli bagi desa, hal tersebut akan mendorong setiap Pemerintah Desa untuk memberikan dukungan positif dalam merespon pendirian BUMDes.

Sebagai sebuah lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes perlu memiliki pembeda dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini bertujuan agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Selain itu, juga penting untuk mencegah berkembangnya sistem usaha yang bersifat kapitalistis di pedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan yang ada.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres 2002), 17-18

<sup>33</sup> Dinas Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan BUMDES*, (Universitas Brawijaya: 2007), 4

## 2. Jenis Usaha BUMDes

Jenis-jenis usaha yang bisa dijalankan BUMDes berikut ini :

- a. Usaha sosial, merupakan usaha sederhana yang memberikan layanan umum kepada setiap masyarakat yang bertujuan mendapatkan keuntungan keuangan. Contohnya adalah pengolahan makanan pokok.
- b. Usaha penyewaan, meliputi penyewaan barang yang melayani kebutuhan masyarakat desa dan berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Contohnya adalah penyewaan alat pengolahan lahan/tanah.
- c. Usaha perdagangan atau usaha produksi dan distribusi, BUMDes dapat mengimplementasikan usaha penjualan jasa atau barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya adalah pembuatan undangan pernikahan.
- d. Usaha perantara, BUMDes dapat berperan sebagai perantara dalam distribusi komoditas petani ke pasar, sehingga memperpendek jalur distribusi tersebut.
- e. Usaha gabungan, BUMDes menjadi unit usaha yang mampu diwujudkan oleh masyarakat desa. Contohnya adalah pengelolaan destinasi wisata yang melibatkan partisipasi seluas-luasnya dari masyarakat.
- f. Kontraktor, BUMDes dapat bekerja sama dalam pelaksanaan proyek-proyek desa sebagai mitra kerja.
- g. Keuangan (Koperasi/Perbankan).<sup>34</sup>

## 3. Tujuan Berdirinya BUMDes

BUMdes bertujuan untuk memperoleh dan memaksimalkan kemampuan wirausaha di desa.<sup>35</sup> Sesuai

---

<sup>34</sup> Abdul Rahman, dkk, *Bumdes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 6

<sup>35</sup> P.L. Rika Fatimah, “Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-Bumdes) Untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa Dengan Menggunakan Model Tetrapreneur”, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2018, 126

dengan UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005, pemerintah desa diberikan mandat untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam perencanaan dan pembentukannya, BUMDes didasarkan pada inisiatif masyarakat dan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif. Ada dua prinsip yang menjadi dasar, yaitu member base (berdasarkan anggota) dan self help (bantuan mandiri). Penting untuk memperhatikan bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri, dengan mempertimbangkan kebutuhan produksi dan konsumsi anggota secara efektif.<sup>36</sup>

BUMDes dibentuk melalui musyawarah desa dan beroperasi secara independen dari organisasi Pemerintah Desa dengan tujuan utama mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi di wilayah pedesaan, BUMDes bertanggung jawab dalam mengelola berbagai sumber daya yang ada di Desa sebagai upaya untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dan memberdayakan masyarakat setempat. Berikut ini merupakan tujuan didirikannya BUMDes, yaitu:

- a. Memperkuat sektor ekonomi.
- b. Memaksimalkan asset supaya berdaya guna bagi kesejahteraan Desa.
- c. Memperkuat semangat warga dalam mengelola potensi ekonomi Desa.
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha lintas desa atau dengan pihak lain.
- e. Mewujudkan *opprtunity* dan *market network* yang sesuai kebutuhan warga.
- f. Terbukanya lapangan pekerjaan.

---

<sup>36</sup> Coristya Berlian Ramadan, dkk, "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa", Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 1, No. 6, 1073

g. Memperkuat kemandirian masyarakat melalui perbaikan layanan, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

h. Memperkuat *income* masyarakat dan *income* desa.<sup>37</sup>

Dinyatakan dalam Undang-Undang bahwa desa bisa mendirikan BUMDes menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan masing-masing desa. Kebutuhan desa mengacu pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, sedangkan potensi desa merujuk pada sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal, termasuk kekayaan yang dimiliki oleh desa dan permintaan pasar. Penting juga adanya sumber daya manusia yang mampu mengatur badan usaha sebagai aset pendorong kemajuan ekonomi masyarakat. Di samping itu, perlu adanya wadah bagi unit-unit usaha yang merupakan hasil dari kegiatan ekonomi masyarakat. Saat ini, banyak unit usaha tersebut hanya dikelola secara parsial dan belum mendapatkan akomodasi yang memadai.<sup>38</sup>

#### 4. Sumber Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Membentuk dan menjalankan usaha tentunya membutuhkan sebuah anggaran dana sebagai modal awalnya. Modal sangat diperlukan dalam menjalankan sebuah jenis usaha, mengingat bahwa modal merupakan instrument penting dalam langkah awal memulai usaha. Modal awal dalam pembentukan BUMDes bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Des).
- b. Modal bersama dari masyarakat Desa.
- c. Penyertaan modal Desa yang bersumber dari: pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan,

---

<sup>37</sup> Peraturan KemenDes PDPT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pasal 3.

<sup>38</sup> Mujiyono, "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung", (Semarang: Universitas Negeri Semarang (2017).8-9

dana hibah, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah dan kekayaan asset Desa.<sup>39</sup>

## 5. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes memiliki peranan penting untuk disampaikan secara rinci agar dapat dipahami dan diterima dengan cara yang seragam oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat. Terdapat enam prinsip utama yang menjadi landasan dalam mengelola BUMDes, yaitu:

- a. *Kooperatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. *Partisipatif*. Dalam BUMDes, semua komponen yang terlibat harus bersedia memberikan dukungan dan kontribusi secara sukarela untuk mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. *Emansipatif*. Di dalam BUMDes, semua komponen yang terlibat harus diperlakukan secara adil tanpa memandang golongan, suku, atau agama.
- d. *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diakses dan diketahui dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.
- e. *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha dalam BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. *Sustainabel*. Kegiatan usaha dalam BUMDes harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dengan dukungan dana anggaran desa yang semakin besar, sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dapat difungsikan untuk pembangunan desa.

---

<sup>39</sup> Peraturan KemenDes PD TT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pasal 17 dan 18

Hal mendasar yang krusial dalam usaha penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama dalam bentuk kebersamaan dan menjalin kerekatan di semua lini masyarakat desa. Hal ini akan menjadi daya dorong yang kuat dalam upaya mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan membuka akses pasar.<sup>40</sup>

#### D. Penelitian Terdahulu

Pada bagian sub bab ini, penulis memaparkan terkait kajian ilmiah terdahulu dan konsep-konsep yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Perlu diketahui bahwa hasil penelitian terdahulu dijadikan sebagai kajian untuk ditelaah secara seksama. Berikut ini adalah penelitian terdahulu:

**Pertama**, riset yang dilakukan oleh Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni pada tahun 2016 yang dituliskan kedalam bentuk jurnal dengan mengangkat tema Peranan Badan Usaha Milik Dsa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDES di Gunung Kidul, Yogyakarta. Riset ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori Resource Based View (Barney,1991) dan teori Stakeholders (Mitchell, 1997). Temuan dari riset ini menunjukkan bahwa hadirnya BUMDes berkontribusi terhadap PAD, namun sayangnya belum dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat serta belum dapat menyerap tenaga kerja di Desa yang berakibat banyaknya masyarakat belum dapat diberdayakan. Selain itu, kurangnya sosialisasi serta komunikasi menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui mengenai informasi tentang pelaporan pengelolaan serta kegiatan yang dijalankan oleh BUMDes.

**Kedua**, riset yang dilakukan oleh Yulianus Nardin pada tahun 2019 yang dituliskan kedalam bentuk jurnal dengan mengangkat tema Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes. Riset ini menggunakan metode penelelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teori Ismawan Priyono tentang lima program strategi pemberdayaan. Temuan dari riset ini menunjukkan

---

<sup>40</sup> Dinas Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDES.*, 13

bahwa peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat pada program BUMDes di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu belum sepenuhnya berjalan efektif, hal ini disebabkan pada permasalahan staff pengelola yang memberikan dampak terhadap tidak terawatnya pertanian hidroponik.

**Ketiga**, riset yang dilakukan oleh Syndi Dwi Purnamasari dan Muhammad Farif Ma'aruf pada tahun 2020 yang dituliskan kedalam bentuk jurnal dengan mengangkat tema Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Studi BUMDes Mawar Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Riset ini menggunakan metode penelitian adalah deskriptif kualitatif, untuk teori yang dipakai adalah teori Najiyati mengenai prinsip-prinsip pemberdayaan. Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa pada prinsip kesetaraan, BUMDes Mawar tidak membedakan gender ataupun golongan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ingin mengikuti program yang dibuat oleh BUMDes. Pada prinsip partisipasi, BUMDes Mawar memberikan pendampingan pada program yang ada serta memberikan bantuan permodalan dan alat pendukung bagi UMKM serta menyediakan ternak, kandang dan pakan untuk program peternakan. Pada prinsip kemandirian (kemandirian), BUMDes Mawar memberikan masyarakat hak suara untuk mengadakan program apa yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di Desa Kepel, namun dalam pengadaan pakan ternak BUMDes Mawar belum dikatakan mandiri dikarenakan masih melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Pada prinsip berkelanjutan, program peternakan yang dibuat oleh BUMDes Mawar mengalami perkembangan, yang dapat terlihat dengan bertambahnya jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti program tersebut serta bertambahnya jumlah pembelian ternak yang semula 20 ekor menjadi 50 hingga 100 ekor setiap pembelian.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis akan lebih berfokus pada sistem manajemen organisasi yang dilakukan oleh BUMDes Papanrejo dalam memberbadayakan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori yang dikemukakan oleh Seharto dalam bukunya yang berjudul "Membangun Masyarakat

Memberdayakan Rakyat". Teori tersebut membahas tentang bagaimana mengembangkan organisasi yang efektif dan efisien, dengan memperhatikan aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif.

### E. Kerangka Berfikir

Kehadiran BUMDes Papanrejo dalam mengelola potensi sumber yang dimiliki oleh Desa Papanrejo memberikan kontribusi bagi perekonomian Desa dan masyarakat Desa. Hal tersebut sesuai dengan visi yang dicanangkan oleh BUMDes Papanrejo yaitu "Menjadikan BUMDes Papanrejo sebagai katalisator, aggregator, motivator dan penumbuh ekonomi yang berkembang di Desa Papanrejo dan sekitarnya". Berikut ini adalah kerangka berfikir yang disusun oleh penulis dengan menggunakan pendekatan teori pemberdayaan oleh Soeharto dalam buku Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.

#### Model Kerangka Pemikiran

